



LAPORAN

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III // 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 27 Januari 2022. Terdapat 12

(dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Triwulan III ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Juli s.d. 31 September 2022. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim hingga Triwulan III.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 15 Oktober 2022
Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Mochammad Firman Hidayat, SE., MA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	17
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	21
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	28
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	41
3.2. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024	8
Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Perbandingan Realisasi KUR 2021 dan 2022	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7. Semula Menjadi Desain Konstruksi Shrimp Estate	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. Dokumentasi Drone Progres Pembangunan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pemetaan Kompetensi Awak Kapal Perikanan ...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 13. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Pemetaan Kompetensi Awak Kapal Perikanan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Sukabumi .	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Kab Subang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Kab Sampang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 19. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 22. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 24. Grafik Kerjasama Indonesia-Korea	Error! Bookmark not defined.
Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rapat	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	15
Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022	16
Tabel 5. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW II	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Catatan terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Catatan terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Data Kondisi Kapal Hasil Identifikasi Ground Checking	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Data Dokumen Perizinan Kapal Hasil Identifikasi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Indikator Penilaian PMPRB Deputi II Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12. Alokasi Pagu Anggaran Efektif Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13. Realisasi Anggaran TW II TA 2022 Per Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14. Realisasi Anggaran TW II TA 2022 per RO	Error! Bookmark not defined.



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD

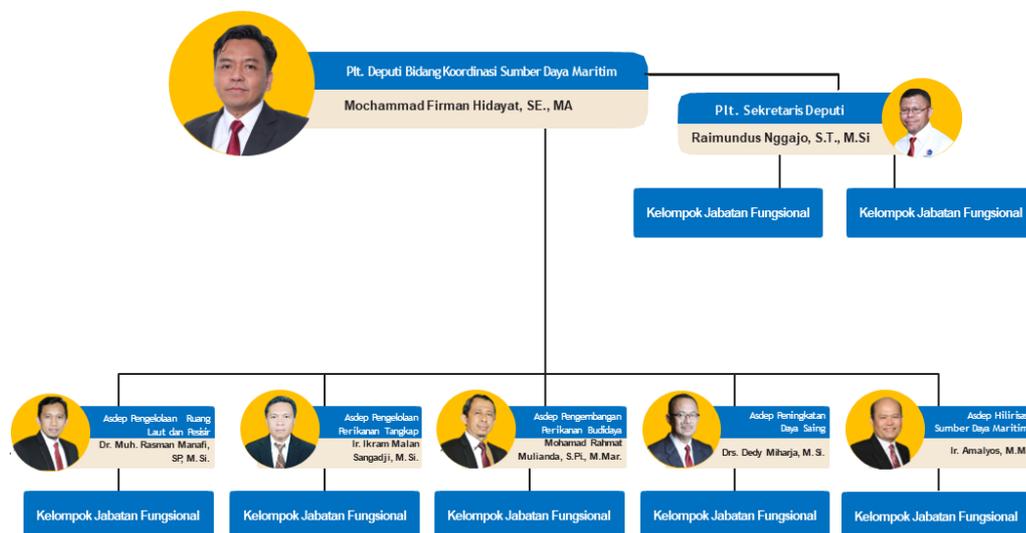
Maritim ditetapkan pada Triwulan III dan IV (TW III dan IV), sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dalam mendukung capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2021.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputi SD Maritim hingga 31 Desember 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

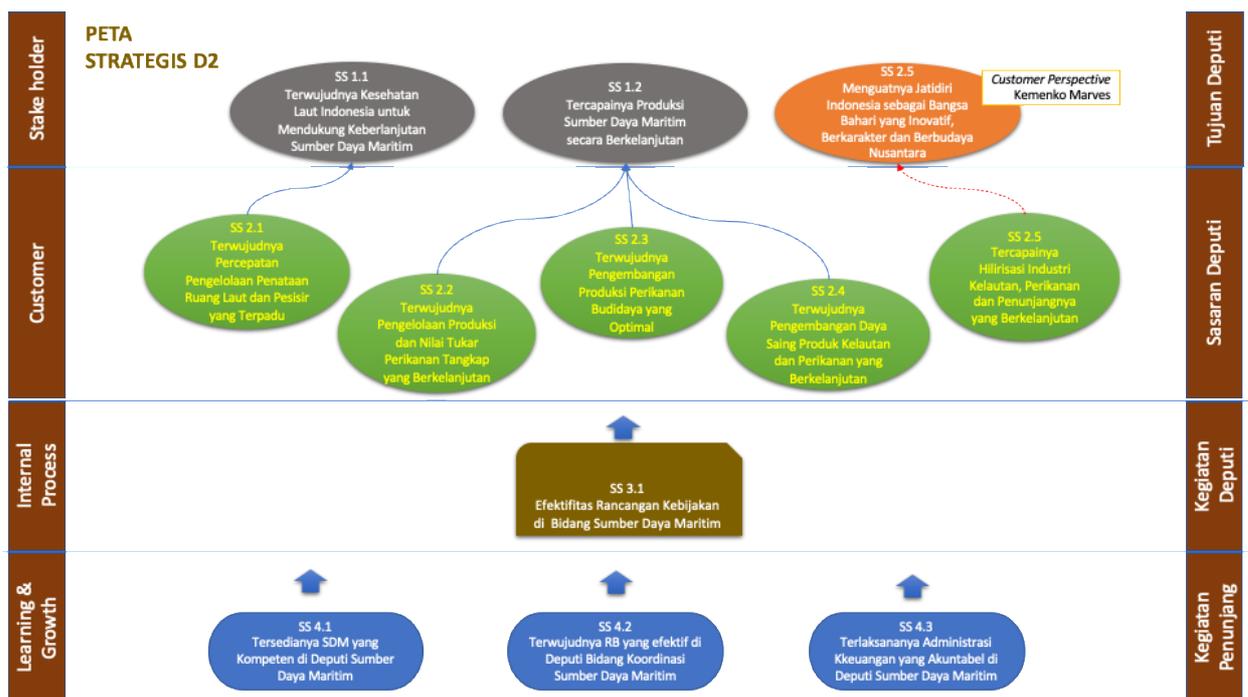
1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022

<i>Stakeholder</i>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<i>Customer</i>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<i>Internal Business Process</i>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<i>Learning and Growth</i>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	80%
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	80%
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	80%
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	80%
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	80%
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	95%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	75
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	97

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

- IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat = Nilai Variabel IKLI Tujuan 1 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 2 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 5 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 6 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 7 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 8 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 9 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

- IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}}{\text{(Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

2

- IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan rata-rata dari capaian rencana zonasi yang diselesaikan, capaian IKLI pada Tahun 2022, dan capaian luas kawasan konservasi

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Capaian Jumlah RZ Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah RZ Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian IKLI Tahun 2022}}{\text{Target IKLI Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}}{3} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2022 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2022 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022. Target dimaksud merujuk pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2022 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Daya Saing Produk Kelautan Perikanan adalah suatu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dalam meningkatkan daya saing usaha hasil perikanan dengan pengefisiensi usaha, mutu dan keamanan produk dalam melakukan inovasi dalam pemasaran produk perikanan yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Formula:

$$\left(\frac{\text{Capaian Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}}{\text{Target Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}} + \frac{\text{Capaian Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}}{\text{Target Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP tahun 2022}} \right) \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan

rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

<p>Formula:</p> $\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

<p>Formula:</p> <p>Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</p>

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 7 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.226.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021 dan Nomor: S-458/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-	Rp359.248.000,-	Rp3.140.752.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-	Rp338.377.000,-	Rp2.461.623.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-	Rp324.074.000,-	Rp2.375.926.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-	Rp297.200.000,-	Rp1.952.800.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-	Rp300.639.000,-	Rp1.949.361.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-	Rp136.108.000,-	Rp1.390.882.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp208.884.000,-	Rp1.991.116.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-	Rp. 1.964.530.000,-	Rp15.262.460.000



BAB
3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputy SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan III dan IV. Berikut adalah hal-hal yang telah dicapai pada Triwulan III TA 2022 guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan pada PK Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022:

Berikutnya, progres kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*. Berikut adalah penjelasan detail dari progres kegiatan pada setiap sasaran strategis:

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan,

tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2021 adalah 76,76. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2022 adalah 76.

Ringkasan progres yang telah dicapai pada TW III dalam rangka penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia adalah telah dilaksanakan Seminar dalam MSPS Expo tgl 13 September 2022 dengan pembahasan "Konsepsi dan Penilaian Kesehatan Laut Berbasis Ekosistem dalam Pemanfaatan Ruang Laut" pada tanggal 13 September 2022 selanjutnya akan dilaksanakan Rakor Penilaian Indeks IKLI untuk tingkat Provinsi pada minggu ke - 4 Oktober 2022

2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim***.

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2022. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Pada Tahun 2021, capaian produk perikanan tangkap dan budidaya adalah 8.088 juta ton untuk perikanan tangkap dan 16,39 Juta Ton untuk perikanan budidaya. Sedangkan capaian nilai ekspor pada Tahun 2021 adalah 5,45 US\$. Nilai capaian produksi perikanan dan nilai ekspor perikanan pada Tahun 2021 statusnya masih prognosa karena masih dilakukan kajian lebih lanjut terhadap capaian tersebut.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Secara matematis sesuai dengan Dokumen RKP 2022, detail dari target IKU ini adalah sebagai berikut:

- Target Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 adalah 8,69 Juta ton
- Target Produksi Rumput Laut pada Tahun 2022 adalah 11,8 Juta ton
- Target Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 adalah 8,88 Juta Ton
- Target Nilai Ekspor Perikanan pada Tahun 2022 adalah 7,13 US\$ Miliar

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan Tahun 2022 dengan variabel yang telah dijelaskan di atas, pada Triwulan III Tahun 2022 untuk

Dalam peningkatan produksi perikanan tangkap telah dilakukan kegiatan:

1. Kunjungan Lapangan Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Program Blue Halo S (Pendekatan Terintegrasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kawasan Konservasi Perairan) dan pembuatan ranperpres untuk menjadi landasan kegiatan tersebut;
3. Sinkronisasi Capaian Pengelolaan Perikanan Tangkap

Dalam peningkatan Nilai Tukar Nelayan telah dilakukan beberapa rakor sinergitas antar K/L terkait peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan. Rapat membahas pemetaan permasalahan yang dihadapi awak kapal perikanan, penyusunan rencana inspeksi nasional dan pembentukan Tim Inspeksi Nasional, pembahasan perkembangan kompetensi awak kapal, dan penyusunan draft kerja sama komitmen penerapan PSMA.

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut

- 1 Penguatan Kelembagaan Poklina
 - Telah dilakukan koordinasi dengan Pengurus Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada prinsipnya dari sisi regulasi dan tanggapan Pengurus, integrasi Sektor KP dan Poklina memungkinkan untuk diakomodasi;

- Telah disampaikan Surat ke K/L dan Pemda Terkait agar segera dilakukan proses integrasi tersebut dan segera dilibatkan dalam rapat komir berikutnya
2. Pengembangan Pilot Project Tambak Tradisional Plus
 - Dari hasil FGD dengan ketua FUI telah diperoleh konsep teknologi yang sesuai untuk diterapkan pada tambak tradisional plus;
 - Berdasarkan hasil koordinasi dengan DKP Pemprov Jawa Timur, pada prinsipnya Pemda siap mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan konsep kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemda (pertambahan ramah lingkungan)
 3. Pembebasan PPN untuk komoditas Udang
 - Sesuai dengan kajian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dengan Dirjen Pajak, pada perubahan UU PPN udang masih tetap dikategorikan sebagai BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
 - Saat ini sedang dilakukan penyusunan PP turunan dari UU HPP dan mencantumkan udang sebagai BKP strategis
 4. Pilot Project Climate Smart Shrimp
 - Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait penentuan pilot project CSS dan meminta pendapat para pakar ahli terkait project CSS.
 - Akan diadakan survey lanjutan dengan investor di daerah Kab. Sukamara yang merupakan lokasi pilot project CSS
 5. Pengembangan Kluster Kampung Budidaya
 - Berdasarkan hasil survey di 6 kampung yang menjadi prioritas, diperoleh 6 poin yang telah disampaikan kepada pihak DJPB agar segera dilakukan pembenahan, diantaranya diperlukan pembangunan pabrik pakan mandiri untuk menekan cost produksi, pembangunan UPI dan perluasan pasar untuk menjamin kepastian harga, penyediaan benih yang lebih berkualitas dan sustainable, integrasi pokdakan kedalam komisi irigasi, dukungan pembangunan infrastruktur dasar utama (jaringan listrik dan jalan produksi, serta penambahan SDM penyuluh yang kompeten)
 6. Optimalisasi KUR Perikanan dan Kelautan
 - Pimpinan Regional Bank BRI Jawa Timur telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan pilot project optimalisasi KUR kemaritiman di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Pemprov Jawa Timur serta dunia usaha telah berkomitmen untuk ikut mendukung program tersebut;
 7. Monev Pendayagunaan Sarpras KP Prioritas

- Berdasarkan hasil evaluasi terkait kondisi terkini dan tingkat utilisasi berbagai sarana prasarana tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum semua infrastruktur yang telah terbangun dioperasikan secara optimal, bahkan ditemukan juga infrastruktur yang belum dioperasikan;

Capaian progres kegiatan satker pusat DJPB diantaranya, PITAP sudah terlaksana 100%, Bantuan excavator sudah terlaksana 100%, Dredger sudah terlaksana 100%, Bantuan kincir sudah terlaksana 88%, Budidaya udang berbasis kawasan progres pembangunan fisik 63%, bantuan mesin dan bahan baku pakan Selesai 100% : 201 unit, Penyelesaian BAST: 28 unit, Proses distribusi: 60 unit, dan Proses SK : 11 Unit; Bantuan bioflok Selesai 100% 69 unit, Proses pengerjaan 173 unit, dan proses E-Catalog 33 unit;

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, Indeks Kesehatan Laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan dan pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Target IKU tersebut berasal dari rata-rata nilai capaian Jumlah RZ, capaian Nilai IKLI dan Capaian Luas Kawasan Konservasi. Detil target pada IKU ini secara matematis adalah sebagai berikut (detil target berasal dari Dokumen RKP 2022) :

- Target Jumlah RZ pada Tahun 2022 adalah 22 RZ
- Target Nilai IKLI pada Tahun 2022 adalah 76
- Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 25,1 Juta Ha

Progres yang telah dicapai pada Triwulan III pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk tata ruang laut daerah, telah ditetapkan 2 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) terintegrasi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Barat dan 8 provinsi telah mendapatkan Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir dari Menteri KKP yaitu provinsi Banten, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Untuk tata ruang kawasan laut nasional, telah ditetapkan 7 Perpres Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZKAW) yaitu RZKAW Laut Jawa, RZKAW Selat Makassar, RZKAW Laut Natuna dan Natuna Utara, RZKAW Laut Sulawesi, RZKAW Teluk Tomini, RZKAW Teluk Bone, RZKAW Laut Maluku, dan telah ditetapkan 3 Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN) terintegrasi yaitu RTR KSN Gerbangkertosusila, RTR KSN Kedungsepur, dan RTR KSN Ibu Kota Negara.
2. Untuk Kegiatan Capaian Kawasan Konservasi telah dilakukan:
 - Bersama PPB dan dukungan mitra pembangunan serta kementerian/Lembaga terkait mengembangkan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP) yang akan di launching pada puncak O20
 - Melaksanakan Kegiatan Road to Ocean20: Workshops on Coral Reef and Blue Natural Capital pada 26-30 Agustus 2022
 - Telah dilakukan Rapat Pembahasan Kerjasama Restorasi Terumbu Karang secara online pada 20 Juli 2022
 - Telah dilakukan pertemuan secara online dengan pihak Jerman (ZMT dan KBRI Berlin) pada 14 Juli 2022
 - Telah dilaksanakan Workshop 'Effective Management to Conserve & Sustainability Use the Oceans' sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Road to G20 pada tanggal 26 September 2022 di Jakarta

- Telah dikirimkan surat permohonan progres rencana tindak lanjut Penenggelaman Kapal Perang Eks TNI AL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dari Asdep PRLP kepada Sekda Kabupaten Buleleng pada 21 September 2022
3. Untuk Indeks Kesehatan Laut Indonesia telah dilaksanakan Seminar dalam MSPS Expo tgl 13 September 2022 dengan pembahasan "Konsepsi dan Penilaian Kesehatan Laut Berbasis Ekosistem dalam Pemanfaatan Ruang Laut" yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Dietriech, terdapat 10 Tujuan dan Filosofi dalam penilaian IKLI yaitu, penyediaan pangan dari laut, kesempatan bagi perikanan tradisional, produk-produk alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, mata pencaharian & ekosistem pesisir, pariwisata dan rekreasi, keunikan wilayah, periaran yang bersih, dan keanekaragaman hayati. Kemudian adapun tujuan penilaian IKLI yaitu, sebagai indikator capaian pembangunan kelautan dan perikanan yg dievaluasi berdasarkan target tahunan, sebagai indikator untuk membandingkan kondisi kesehatan laut secara spasial, antar wilayah atau provinsi, sebagai indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kelautan dan perikanan antar waktu atau periodik, sebagai input atau umpan balik dalam menyusun program kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dan nasional, sebagai arahan tentang pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam tindak lanjutnya akan dianalisis dan dibahas penilaian IKLI dalam tingkat provinsi.
 4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **"Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan"** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan***

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2021 yaitu 8,08 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2022 yaitu 8,88 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 106,79 pada tahun 2022 menjadi 104-106 sesuai dengan target RKP 2022.

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dalam peningkatan produksi perikanan tangkap telah dilakukan kegiatan:

1. Kunjungan Lapangan Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Program Blue Halo S (Pendekatan Terintegrasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kawasan Konservasi Perairan) dan pembuatan ranperpres untuk menjadi landasan kegiatan tersebut;
3. Sinkronisasi Capaian Pengelolaan Perikanan Tangkap

Dalam peningkatan Nilai Tukar Nelayan telah dilakukan beberapa rakor sinergitas antar K/L terkait peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan. Rapat membahas pemetaan permasalahan yang dihadapi awak kapal perikanan, penyusunan rencana inspeksi nasional dan pembentukan Tim Inspeksi Nasional, pembahasan perkembangan kompetensi awak kapal, dan penyusunan draft kerja sama komitmen penerapan PSMA.

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang optimal adalah kondisi dimana produksi perikanan budidaya Tahun 2021 sebesar 16,39 Juta Ton perlu dikembangkan menjadi 20,49 Juta Ton terdiri dari produksi Ikan sebesar 8,69 Juta Ton dan produksi rumput laut sebesar 11,8 Juta Ton (Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP 2022).

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut

1 Penguatan Kelembagaan Poklina

- Telah dilakukan koordinasi dengan Pengurus Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada prinsipnya dari sisi regulasi dan tanggapan Pengurus, integrasi Sektor KP dan Poklina memungkinkan untuk diakomodasi;
- Telah disampaikan Surat ke K/L dan Pemda Terkait agar segera dilakukan proses integrasi tersebut dan segera dilibatkan dalam rapat komir berikutnya

2. Pengembangan Pilot Project Tambak Tradisional Plus

- Dari hasil FGD dengan ketua FUI telah diperoleh konsep teknologi yang sesuai untuk diterapkan pada tambak tradisional plus;
- Berdasarkan hasil koordinasi dengan DKP Pemprov Jawa Timur, pada prinsipnya Pemda siap mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan konsep kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemda (pertambahan ramah lingkungan)

3. Pembebasan PPN untuk komoditas Udang

- Sesuai dengan kajian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dengan Dirjen Pajak, pada perubahan UU PPN udang masih tetap dikategorikan sebagai BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
- Saat ini sedang dilakukan penyusunan PP turunan dari UU HPP dan mencantumkan udang sebagai BKP strategis

4. Pilot Project Climate Smart Shrimp

- Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait penentuan pilot project CSS dan meminta pendapat para pakar ahli terkait project CSS.
- Akan diadakan survey lanjutan dengan investor di daerah Kab. Sukamara yang merupakan lokasi pilot project CSS

5. Pengembangan Kluster Kampung Budidaya

- Berdasarkan hasil survey di 6 kampung yang menjadi prioritas, diperoleh 6 poin yang telah disampaikan kepada pihak DJPB agar segera dilakukan pembenahan, diantaranya diperlukan pembangunan pabrik pakan mandiri untuk menekan cost produksi, pembangunan UPI dan perluasan pasar untuk menjamin kepastian harga, penyediaan benih yang lebih berkualitas dan sustainable, integrasi pokdakan kedalam komisi irigasi, dukungan pembangunan infrastruktur dasar utama (jaringan listrik dan jalan produksi, serta penambahan SDM penyuluh yang kompeten)

6. Optimalisasi KUR Perikanan dan Kelautan

- Pimpinan Regional Bank BRI Jawa Timur telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan pilot project optimalisasi KUR kemaritiman di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur serta dunia usaha telah berkomitmen untuk ikut mendukung program tersebut;

7. Monev Pendayagunaan Sarpras KP Prioritas

- Berdasarkan hasil evaluasi terkait kondisi terkini dan tingkat utilisasi berbagai sarana prasarana tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum semua infrastruktur yang telah terbangun dioperasikan secara optimal, bahkan ditemukan juga infrastruktur yang belum dioperasikan;

Capaian progres kegiatan satker pusat DJPB diantaranya, PITAP sudah terlaksana 100%, Bantuan excavator sudah terlaksana 100%, Dredger sudah terlaksana 100%, Bantuan kincir sudah terlaksana 88%, Budidaya udang berbasis kawasan progres pembangunan fisik 63%, bantuan mesin dan bahan baku pakan Selesai 100% : 201 unit, Penyelesaian BAST: 28 unit, Proses distribusi: 60 unit, dan Proses SK : 11 Unit; Bantuan bioflok Selesai 100% 69 unit, Proses pengerjaan 173 unit, dan proses E-Catalog 33 unit;

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan prasarana logistik, peningkatan mutu serta pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing. Kondisi yang berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana tercapainya target ekspor hasil perikanan sesuai target pada RKP 2022 dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk.

Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mencapai nilai ekspor hasil perikanan dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk sesuai target pada RKP 2022. Berdasarkan Dokumen RKP Tahun 2022, target nilai ekspor perikanan pada Tahun 2022 adalah sebesar 7,13 US\$ Miliar.

Dalam rangka mendukung capaian nilai ekspor perikanan Tahun 2022 hal-hal yang telah dilaksanakan adalah berikut:

Arah kebijakan kelautan dan perikanan dalam RPJMN 2020-2024 terkait Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan antara lain peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi, dan mutu produk kelautan dan perikanan, dengan target ekspor adalah USD 8,2 Miliar pada tahun 2024. Dalam Rapat Koordinasi Kinerja Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Semester 1 Tahun 2022 dan Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan 2019-2024 di Manado, Sulawesi Utara disampaikan bahwa nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai USD 529,98 Juta (Rp 7,86 Triliun) atau Naik 23,13% dibandingkan dengan bulan Mei 2022 dan volume ekspor produk perikanan Indonesia pada bulan Juni 2022 sebesar 101,91 ribu ton atau Naik 21,68% dibandingkan bulan Mei 2022,

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya adalah kondisi dimana adanya pengembangan industri penghasil bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir) di sektor industri kelautan, perikanan, dan penunjangnya.

Kondisi yang Berkelanjutan adalah suatu capaian akumulatif dari capaian ketersediaan inovasi teknologi industri perikanan untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah hasil riset yang dimanfaatkan industri kelautan dan perikanan Tahun 2022 dengan berorientasi antara lain pada kelestarian lingkungan hidup, partisipasi publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan adalah kondisi dimana tercapainya persentase capaian akumulatif dalam capaian ketersediaan inovasi teknologi industri perikanan untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi

untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, partisipasi public dan pertumbuhan ekonomi.

Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri perikanan untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung capaian tersebut, rangkaian progres yang telah dilaksanakan telah dilaporkan pada bagian 3.1.3 dalam laporan penyusunan kebijakan yang telah dilakukan.

3.1.3 Internal Business Perspective

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2022 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan kebijakan pada TW III Tahun 2022 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Pada penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang, progres persentase yang telah dicapai adalah 50% dengan ringkasan progres yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Produksi Udang

- Telah disahkan Kepmenko POKJANAS Akselerasi Produksi Industri Udang yang didalamnya telah terkandung Matriks Crash Program. Permenko tersebut telah disosialisasikan melalui rakor tingkat eselon 1
- Berdasarkan hasil Monev untuk Bidang Dukungan Infrastruktur Pertambakan, Hilirisasi dan Pemasaran, serta Input Produksi, diperoleh data bahwa progress kegiatan sebagian sudah memenuhi target.

2. Simplifikasi Perizinan Berusaha

- Telah disusun draft panduan perizinan berusaha tambak udang melalui sistem OSS RBA hasil dari simplifikasi perizinan
- Draft Buku Panduan perizinan telah dikirimkan kepada BKPM untuk memperoleh usulan penyempurnaan
- Pada tanggal 26 Oktober 2022 akan dilakukan launching Panduan Perizinan Berusaha.

3. Pemanfaatan Test Kit PCR Penyakit Udang Buatan Dalam Negeri

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim DJPB KKP, saat ini produk Nusantic akan dilakukan uji mutu di Balai Perikanan Serang.

b) Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan

Pada penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan, ringkasan progres yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Seaweed Estate di Maluku Tenggara

- Pemda telah menyiapkan lokus untuk pengembang lab kultur jaringan yang akan dikerjasamakan bersama pihak swasta;
- Pihak Swasta dan Biotrop/IPB saat ini sedang dalam proses pembahasan kerjasama untuk mendukung kegiatan pengembangan lab. Kultur jaringan rumput laut;
- K/L bersama MTCRC telah memetakan lokus yang sesuai untuk pengembangan kebun budidaya rumput laut
- Akan dikembangkan kolaborasi lembaga riset lain dan pihak swasta dalam produksi bibit seaweed yang berkualitas. Peran riset komoditas unggulan akan diperkuat dengan agenda riset yang terarah, focus terhadap solusi; memperkuat intermediasi dengan pengguna.

2. Percepatan Investasi Rumput Laut di NTT

- Berdasarkan hasil Diskusi Rencana Investasi LN untuk Industri Seaweed dan Penguatan kontribusi BKPM, diperoleh informasi bahwa BKPM saat ini telah melakukan kajian potensi investasi rumput laut di provinsi NTT, ditargetkan kajian tersebut akan selesai pada tahun ini
- Berdasarkan hasil Indonesia Philipines Business Meeting dan Meeting dengan President W Group di Jakarta, diperoleh informasi bahwa pihak private sector dari Filipina tertarik untuk melakukan investasi pabrik pengolahan rumput laut. Ditargetkan dalam waktu dekat (bulan Oktober/November) akan segera dilakukan MoU rencana investasi tersebut
- Telah dilakukan Meeting dengan CBI Netherland terkait Pembahasan Supply Chain Seaweed ke pasar Uni Eropa, Kerjasama Peningkatan Kualitas Processing Seaweed Nasional
- Berdasarkan Rapat koordinasi dan tinjauan Lapangan ke NTT telah terkumpul data data yang selanjutnya akan digunakan untuk Fine Tuning & Pemenuhan kelengkapan Informasi detail untuk kebutuhan investasi LN. Pada kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan Penjajagan komitmen Pemda NTT dalam memprioritaskan program industrialisasi Seaweed serta Peninjauan Aktifitas Hulu dan Hilir Industri Seaweed yang ada saat ini

3. Penataan KJA Danau Toba

- Penertiban dan Penataan KJA Masyarakat dan KJA Perusahaan akan terus dilanjutkan sesuai skenario Lini Masa sampai dengan Tahun 2023, dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini
- Alih Usaha akan dikembangkan untuk mencari model yang tepat, propektif, sesuai economic of scale-nya dan berkelanjutan untuk untuk sumber penghidupan masyarakat terdampak
- Penanganan KJA Swasta sesuai dengan Lini Masa akan dilakukan pada Tahun 2023, saat ini tidak diperboelhkan adanya penambahan KJA baru atau pemberian izin baru. KJA Swasta harus turut membantu pengembangan KJA masyarakat yang lebih modern dan ramah lingkungan
- Kajian carrying capacity terakhir sedang dilakukan oleh Tim Pakar yang kompeten untuk menilai status perairan, tingkat daya dukung (carrying capacity), dan konstelasi linta sektor yang berpengaruh dalam keberlanjutan ekosistem Danau Toba

4. Penataan KJA Danau Cirata, Saguling dan Jatiluhur

- Komitmen partisipasi Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan stakeholder terkait dalam mendukung alih usaha masyarakat disekitar waduk yang terdampak dari penertiban KJA, dengan kegiatan usaha yang memiliki skala ekonomi yang memadai dan mampu menjadi sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat;
- Dalam waktu dekat Pergub terkait tata kelola keramba jaring apung di kawasan waduk cirata, waduk saguling dan waduk jati luhur akan segera disahkan;
- Untuk penertiban di waduk jatiluhur, saat ini Juklak sudah selesai disusun. Anggaran dari Perum Jasa Tirta sudah di secure. Target akhir Oktober akan dilaksanakan ceremony penertiban;

c) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer, pada TW III ini persentase capaiannya adalah 75% dengan ringkasan progres capaiannya adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan rapat tindak lanjut terkait pembahasan FS dengan BRIN secara Bilateral dua kali:
- Menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh BRIN guna konfirmasi persiapan pembuatan FS (7 Juli 2022)
- Mengundang rapat BRIN untuk mengetahui update perkembangan dalam rangka pembuatan FS (25 Agustus 2022) dari rapat tersebut di sepakati bahwa BRIN akan menambahkan kajian ekonomi terkait penggunaan teknologi Iradiasi

d) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan, TW III ini persentase pencapaiannya adalah 75% dengan ringkasan progres yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pembelian barang impor untuk pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN, sehingga Presiden menyampaikan bahwa pengadaan barang impor harus dikurangi, dan perlu upaya peningkatkan belanja produk dalam negeri;

2. Permasalahan distribusi logistik perikanan saat ini adalah jumlah unit reefer container masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia serta keterbatasan dan mahalnya harga sewa untuk reefer container kapasitas ekspor;
3. Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satu penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun reefer container dalam proses pengangkutan;
4. Telah terbangun prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton yang diproduksi oleh PT INKA (Persero) dan telah diuji cobakan pada armada kapal PT PELNI (Persero) sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing 1 unit untuk kapasitas 1 dan 5 ton;
5. Uji coba pemanfaatan reefer container tahap I dilaksanakan di KM Bukit Raya pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022 dilanjutkan dengan uji coba pemanfaatan tahap II pada tanggal 5 Juni 2022 sampai 18 Juni 2022 di KM Awu menunjukkan hasil yang memuaskan dimana suhu target yang diinginkan dan sistem IoT yang dipasangkan pada reefer container selama pengujian bekerja dengan baik;
6. Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PELNI (Persero), PT INKA (Persero), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Sinergi Sarana Logistik BUMN dan Perguruan Tinggi pada 21 Juli 2022, hal ini sebagai landasan kerja sama pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri untuk sarana logistik dalam negeri (kapal angkutan barang dan perintis) maupun untuk kapasitas ekspor;
7. Reefer container milik PT INKA (Persero) dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan PT PELNI (Persero) dalam memenuhi kebutuhan reefer container PT PELNI (Persero) dengan jumlah 62 unit untuk kapasitas 20 feet yang saat ini sedang dalam proses administrasi pengadaan;
8. PT INKA (Persero) telah membangun prototipe reefer container kapasitas 20 dan 40 feet dan akan dilakukan uji coba pemanfaatannya seiring dengan adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan reefer container industri rantai dingin Indonesia;

9. Telah dilakukan sertifikasi TKDN untuk reefer container kapasitas 1 dan 5 ton dan sedang dalam proses persiapan pengajuan sertifikasi TKDN untuk kapasitas 20 dan 40 feet;
 10. Berdasarkan data kebutuhan reefer container secara nasional, diperkirakan masih ada sekitar 40% potensi proyek ini, sehingga Kemenko Marves akan mendorong optimalisasi produksi reefer container buatan dalam negeri.
9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada TW III Tahun 2022 Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputy yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia

Ringkasan progres yang telah dicapai pada TW III dalam rangka penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia adalah telah dilaksanakan Seminar dalam MSPS Expo tgl 13 September 2022 dengan pembahasan "Konsepsi dan Penilaian Kesehatan Laut Berbasis Ekosistem dalam Pemanfaatan Ruang Laut" pada tanggal 13 September 2022 selanjutnya akan dilaksanakan Rakor Penilaian Indeks IKLI untuk tingkat Provinsi pada minggu ke - 4 Oktober 2022.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap, pada TW Tahun 2022 ringkasan progres

yang telah dicapai adalah telah dilakukan beberapa rakor sinergitas antar K/L terkait peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan. Rapat membahas pemetaan permasalahan yang dihadapi awak kapal perikanan, penyusunan rencana inspeksi nasional dan pembentukan Tim Inspeksi Nasional, pembahasan perkembangan kompetensi awak kapal, dan penyusunan draft kerja sama komitmen penerapan PSMA.

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT)

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT), pada Triwulan II Tahun 2022 ini capaian progres yang telah dicapai adalah 75% dengan ringkasan progres yang dicapai adalah sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan sistem rantai pasok produk perikanan (fisheries value chains) perlu ditunjang dengan fasilitas logistik yang memadai salah satunya adalah dengan tersedianya fasilitas Ice Maker yang diintegrasikan dengan gudang penyimpanan dan sekaligus pengolahan filet (pemotongan) yang biasa disebut dengan Integrated Cooling System (ICS). ICS tersebut telah dikembangkan dengan dukungan supply energy listrik yang bersumber dari matahari atau disebut Solar Cold Chains. Pada tahun ini akan dilakukan penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara Deputi Bidang SDM dan GIZ sebagai landasan aksi proyek kerjasama Hibah antara Pemerintah Indonesia dan Jerman.

Proyek dinamakan Solar Cold Chains For Green Economy in Indonesia (SOCOOL), dimana akan dibangun beberapa ICS dengan memanfaatkan tenaga surya dengan dukungan Hibah Pemerintah Jerman sebesar 5 Juta EUR. IA akan ditandatangani pada bulan Desember awal dan pada kwartal ketiga ini Oktober-November akan dilakukan penyusunan Draft yang melibatkan Instansi teknis terkait (KKP, ESDM, dll).

d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan II Tahun

2022 persentase yang telah dicapai adalah 75% dengan ringkasan progres yang dicapai adalah penyediaan infrastruktur pemasaran seperti halnya optimalisasi bantuan penyediaan cold storage sehingga dapat meningkatkan fungsi dan klasifikasi jaringan jalan pada wilayah sentra utama memiliki hubungan pergerakan yang intens terhadap supply dan stok ikan hingga ke pelosok seperti fasilitas cold storage sebesar 1000 ton dan 2000 ton di Pasar Ikan Modern Muara Baru yang menunjang distribusi pemasaran produk perikanan nasional dan cold storage kapasitas 100 ton dan 200 ton di SKPT Mimika yang difungsikan untuk menampung hasil perikanan di PPI Poumako sebelum diekspor.

e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi, pada Triwulan III Tahun 2022 persentase progres yang telah dicapai adalah 75% dengan ringkasan progres yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan Rakor terkait Peningkatan Petugas Mutu dari rakor tersebut perlu dilakukan tindak lanjut:
 - Perlu adanya sinergitas baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan standart kompetensi dan kapasitas petugas mutu.
 - Terlaksananya sosialisasi/edukasi/refreshment untuk meningkatkan kompetensi petugas mutu
 - Usulan transformasi dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional (Pembina mutu) perlu ditindak lanjuti guna mereduksi dinamika perpindahan (turn over) petugas di daerah.
 - Kemenko Marves perlu mendorong efektivitas petugas mutu melalui koordinasi dengan Bappenas terkait anggaran.
- Telah dilakukan Rakor terkait Pelayanan Sertifikasi Mutu
 - Perlu dibuat pemetaan tingkat compliance/pemenuhan terhadap CPIB dan CBIB per provinsi, pelabuhan, dan kapal;
 - Perlu disusun Matriks Rantai Sertifikasi mutu dari hulu sampai hilir yang mencakup: CPIB, CBIB, HC, HACCP, dan SNI;

f) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan, pada TW III Tahun 2022 capaian yang dihasilkan adalah 75% dengan ringkasan capaiannya adalah sebagai berikut:

PT. Tjakrawala Timor Sentosa

Progres

- Dokumen persyaratan pengajuan HGU telah lengkap
- Pada tanggal 16 September 2022 PT TTS telah mengajukan permohonan pengajuan sertifikat HGU melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
- Pada tanggal 19 September 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang memberikan tanggapan kepada PT TTS bahwa perlu dilakukan pembahasan terhadap dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Bersama (PKKPR) PT TTS bersama Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ATR/BPN

B. PT. Timor Livestock Lestari

o Progres

- Telah memiliki Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Surat Persetujuan oleh Gub NTT
- Dokumen Perjanjian Sewa Tanah telah diaddendum oleh Gub NTT sebagai bahan pendukung pemrosesan HGU
- Sedang berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT untuk pengajuan izin HGU

C. PT. Timor Garam Lestari (TGL)

o Progres

- Telah memiliki Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Surat Persetujuan oleh Gub NTT
- Sedang proses pengajuan addendum dikarenakan ada perubahan nama Direktur Utama

D. PT. Terang Garam Indonesia (TGI)

o Progres

- Telah memiliki Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Surat Persetujuan oleh Gub NTT
- Dokumen Perjanjian Sewa Tanah telah di adendum oleh Gub NTT sebagai bahan pendukung pemrosesan HGU

F. PT. Cladtek Asian Spool Base (CASB)

o Progres

- Gubernur NTT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Surat No BU.030/6260/BPAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Pemutusan Hubungan Kerja
- Dirut PT Cladtek telah bersurat ke Gub NTT No CBM/2022/GEN/003 tanggal 5 September 2022 perihal PT CASB di Kupang.
- Dalam surat tersebut memohon agar Gub NTT dapat mempertimbangkan kembali Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

g) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim

Pada TW III, penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim telah mencapai progres 75% dengan ringkasan capaian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Penguatan Kerjasama Bilateral Korea dan Indonesia dalam Pengembangan dan pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Kemaritim, sekaligus dengan pengembangan kapasitas SDM dalam training-training langsung dilapangan. Dalam klaster ini, kami telah mengkoordinasi dan mendorong sepanjang 2022 antara lain:

- a. Pengendalian riset-riset dalam skema Ocean ODA Cirebon, antara lain:
 - Riset dan survei pesisir Cirebon terkait mangrove dan garis pantai yang dilaksanakan MTCRC bersama ITB. Salah satu output riset ini yaitu memberikan prediksi kondisi lingkungan dalam 10 – 20 tahun mendatang yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah setempat.
 - Survei dan riset terkait nutrient and pollutant distribution di perairan Cirebon. Survei ini meliputi CTD measurement, water sampling, dan ADCP survey, yang dilaksanakan bersama oleh MTCRC bersama kelompok peneliti oseanografi dan chemistry ITB.
 - Instalasi laboratorium kimia kelautan di ITB Cirebon Watubelah, dan tambahan peralatan survei kelautan. Peralatan laboratorium ini antara lain Nutrient analyzer, FTIR spectrometer, submersible hyperspectral radiometer, Plasma Spectrometer ICP-MS, dan lain-lain. Sebagian perlengkapan telah diimpor dari Australia, Norwegia, dan Korea. Proses hibah dan serah terima akan dilaksanakan pada triwulan ke IV tahun 2022.
 - Survei, training untuk mapping area pesisir menggunakan data dan teknologi remote sensing data, menggunakan drone, GTK GNSS, Google Earth Engine, dan

aplikasi GIS. Rangkaian kegiatan ini dilakukan bersama KemenkoMarves, BRIN, KemenATR, ITB, IPB, UMRAH, UNHAS, UGM, WCS, Bapelitbangda Cirebon.

- Survei-survei yang dilakukan untuk sekaligus training pendalaman dan peningkatan pengoperasian peralatan riset, instrumen dan metodologi di lapangan antara lain terkait bathymetric, seabed, water quality, sediment sample surveys dan numerical modeling
- b. Pengendalian riset-riset dan aktivitas pada fase pertama dimulainya ODA pemanfaatan satelit Korea GEOKompsat 2B. Pada tahun 2021 Deputi SDM menginisiasi usulan ODA project untuk pembangunan sistem aplikasi pengelolaan perairan Indonesia menggunakan satelit geostasioner Korea, dan tahun 2022 proyek tersebut dimulai. Kickoff proyek ini telah dilaksanakan pada 31 Mei 2022, dan proses finalisasi draft Implementing Arrangement/Pengaturan Pelaksanaan sedang berjalan sejak April. Ditargetkan ditandatangani pada bulan Oktober 2022 antara Kemenko Marves bersama KHOA (Korea Hydrographic and Oceanographic Agency), MOF (Ministry of Ocean and Fisheries Korea), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (tentatif).

Beberapa pengendalian sepanjang project ini (2022-2026) antara lain:

- Membangun sistem dan inovasi teknologi informasi spasial kelautan Indonesia menggunakan satelit Chollian 2B, juga sistem utilisasi/processing data satelit, khususnya yang menjawab isu-isu terkini kemaritiman. Pembangunan dilaksanakan bertahap selama 5 tahun berjalannya proyek.
- Akuisisi data data satelit Chollian 2B disertai pembangunan infrastruktur sistem, pengadaan dan pengelolaan server untuk menyimpan data satelit, pengolahan, analisis, dan manajemennya dan peningkatan teknologi terkait.
- Survei-survei di lapangan untuk kalibrasi dan validasi (CAL/VAL), beserta pengadaan peralatan terkait. Kalibrasi dan validasi adalah metode untuk mencocokkan atau mengkonfirmasi antara kondisi dan parameter yang didapat di alam, dengan data yg didapat dari sensor remote sensing. Tanpa CAL/VAL, data satelite dan remote sensing tidak berlaku dan tidak valid.
- Survey dan riset analisis laboratorium di perairan Teluk Makassar (Pulau Lanjukang, Langkai, Baranglombo) bersama MTCRC, Universitas Hasanuddin, dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadikan Provinsi Sulsel lokasi kalibrasi dan validasi (CAL/VAL) data satelit. Kolaborasi penelitian dan pelatihan mendatangkan peneliti dan pakar dari Korea (berasal dari lembaga

KIOST dan KHOA), baik kuliah umum, training lapangan, maupun analisis laboratorium menggunakan fasilitas milik Universitas Hasanuddin.

- Fasilitas penguatan kerjasama riset kemaritiman, kelautan dan perikanan antara MTCRC dengan perguruan tinggi di Indonesia dan Korea. Penguatan kerjasama dilakukan antara melalui MoU antara MTCRC dengan PNU-Pusan National University (terkait joint research dan aktivitas bersama di bidang remote sensing, coastal engineering, environment, juga untuk sharing kebijakan, teknologi dan data yang terkait riset remote sensing), MoU dengan IPB (terkait pemanfaatan teknologi mariculture and sea farming, manajemen pesisir dan pulau kecil khususnya seaweed, pemanfaatan artificial intelligent, dan lain-lain) dan MOU dengan Unhas (terkait marine science and technology, perikanan, teknologi remote sensing termasuk ocean satellite).
- c. Survei monitoring dan evaluasi ICRG lanjutan, sekaligus untuk pemetaan ekosistem pendukung blue carbon. Pelaksanaan survei dan pelatihan dilaksanakan bersama MTCRC, Universitas Udayana, berkolaborasi dengan peneliti dan profesor dari PNU (Pusan National University).
 - Survey pendahuluan di Sanur, Nusa Dua, and Nusa Lembongan bersama Tim PNU, melaksanakan mapping dengan multispectral drone, survey CTD, survey radiometric dengan perangkat USSIMO untuk mendapat data spectral memakai sensor radiance and irradiance. Pengumpulan parameter dalam air dilakukan oleh penyelam professional untuk benchmark objek-objek seperti coral reefs, seagrass, pasir dan batu untuk memperoleh data spectral.
 - Survey ICRG di Nusa Dua dan Buleleng, melaksanakan pengukuran CTD measurement, water sample, dan Aerial benthic mapping menggunakan drone yang dipasang sensor multispectral dan RGB. Metode yang digunakan berbeda dengan kegiatan ICRG 2020, dimana hasil-hasil survei, mapping, benthic, dan lain sebagainya akan dikombinasikan dengan teknologi remote sensing satelit juga hasil olahan dari tim PNU, sehingga dapat mengembangkan riset-riset yang lebih mendalam.
- d. Pengusulan project dan riset kemaritiman kepada pihak Korea melalui MTCRC, antara lain:
 - Pengusulan pembangunan SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS dan dashboard yang bertujuan agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi melalui pemilihan kebijakan yang tepat sasaran tentunya dibutuhkan data yang akurat,

database yang valid serta analisis yang lebih mendalam, yang semuanya dapat disediakan oleh sebuah Sistem Informasi Geografis.

- Pengusulan ODA Project “Smart Aquaculture Technology and Facility Support for Seaweed and Napoleon Fish in Indonesia” kepada Korea, yang bertujuan untuk modernisasi fasilitas akuakultur rumput laut, pengembangan teknologi marikultur, dan program peningkatan kapasitas di bidang akuakultur

2. Klaster 2: Pemanfaatan Riset dan Inovasi Terapan Dalam Mendukung Pemanfaatan Kebutuhan Nasional.

a. Mendorong pengembangan kincir air tambak buatan dalam negeri 1 Fase untuk tambak udang dan ikan skala kecil. Kolaborasi bersama Poltek KP Sidoarjo, PT Barata, KKP, Kemenperin, BSN dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya.

b. Mendorong pengembangan kincir air tambak buatan Dalam Negeri 3 Fase dengan nilai kandungan lokal sebesar 40.03% untuk tambak udang/bandeng skala kecil. Kolaborasi bersama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PT. Om Hwahaha, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standarisasi Nasional dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya. Sebagai informasi tambahan, produk ini kami dorong dan telah dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 1.300 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Mendorong pengembangan kincir air tambak buatan Dalam Negeri (3 Fase) dengan nilai kandungan lokal sebesar 40.07% untuk tambak udang skala industri. Kolaborasi bersama PPNS Surabaya, PT. BBI, PT. Om Hwahaha, Kemenperin, KKP, BSN dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya.

d. Mendorong penggunaan teknologi IoT (Internet of Things) dengan fokus meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan kecil dengan solusi smart fishing. Alat ini akan memperlengkapi nelayan kecil dengan perangkat Vessel Multi Aid (VMA), yaitu perangkat onboard yang dipasang di kapal nelayan dengan berbagai fitur navigasi dan keselamatan termasuk notifikasi SOS juga fitur-fitur untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu juga dilengkapi dengan Integrated Online System yang dapat memantau pergerakan seluruh kapal secara real-time; sistem notifikasi seperti kapal keluar masuk pelabuhan; juga berbagai bentuk laporan pergerakan dan produksi yang dapat menjadi salah satu sistem pendukung pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah setempat.

e. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan kontainer berpendingin (reefer container) dalam negeri kolaborasi antara PT. Industri Kereta Api (INKA), PT.

Pelayaran Indonesia (PELNI) dan Perguruan Tinggi. Hasil inovasi ini telah diujicobakan dan dimanfaatkan oleh PT. Pelni pada KM. Awu dan KM. Bukit Raya.

f. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan offshore pipe, valve dan pompa hasil research and development hasil kolaborasi industri pengecoran logam dalam negeri dengan berbagai pihak untuk menunjang industri di bidang kemaritiman (perkapalan, offshore oil and gas, dan lain sebagainya). Kolaborasi dilakukan bersama dengan Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO) dan Kemenperin.

g. Fasilitasi tindak lanjut Joint Study Agreement (JSA) antara Pertamina dan ExxonMobil dalam hal pengkajian dan penerapan teknologi Carbon Capture & Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) di tiga wilayah migas meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Barat.

h. Mendorong pengembangan produk baterai lithium buatan dalam negeri oleh PT. Intercallin. Selanjutnya produk baterai lithium dalam negeri akan dimanfaatkan pada kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan event G20 di Indonesia.

h) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan, hal-hal yang telah dikoordinasikan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1.4 Learning and Growth

3. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Pada Triwulan III Tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan kompetensi SDM pada Lingkup Deputi adalah sebagai berikut:

- 1) Staff Pranata Komputer Ahli Pertama pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan tersebut

bertujuan agar unit kerja lingkup Kemenko Marves mampu menyusun manajemen risiko SPBE pada unit kerja masing-masing.

- 2) Pegawai dan operator penyusunan laporan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan, baik Laporan Kinerja dan juga Laporan Bulanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan pendokumentasian kinerja pada laporan.
 - 3) Perwakilan pegawai Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mengikuti workshop melukis infografis di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kegiatan ini bertujuan menunjang keterampilan dalam membuat data infografis.
 - 4) Perwakilan pegawai Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, hal ini bertujuan agar masing-masing unit kerja mampu melakukan penilaian mandiri dalam penyelenggaraan SPIP.
4. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2022.

Pada Triwulan III, telah dilakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim bersama tim Inspektorat. Pada 14 September 2022 telah dikeluarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang dikeluarkan oleh Tim Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan penilaian Tim Inspektorat, pada Tahun 2022 untuk penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mencapai nilai 75,87 dengan indikator BB. Berikut adalah detail dari penilaian tersebut:

No	Komponen	2021	2022
----	----------	------	------

		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	43	32,02	35	27,51
2	Pengukuran Kinerja	36	27,98	30	22,66
3	Pelaporan Kinerja	21	15,97	20	14,54
4	Evaluasi Internal	N/A	N/A	15	11,16
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,97	100	75,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB

Dalam pelaksanaan RB, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TW III niai sementara Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah 33,58, selanjutnya akan dilaksanakan *entry meeting* pada 12 Oktober 2022 dan *exit meeting* pada Desember 2022.

5. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2021 sesuai dengan PK Deputy SD Maritim sebesar 96. Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D.

Pada TW III Tahun 2022, realisasi penyerapan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 10.812.534.735,- dengan persentase capaian 70,84 % dari total pagu anggaran Deputy, Rp. 17.226.990.000,-. Capaian output berdasarkan dari nilai realisasi yang didapat juga telah 100% dilaporkan. Dalam pengelolaan anggaran terdapat 1 kali Revisi DJA serta 3 kali revisi POK. Lalu pada Triwulan III terdapat 278 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya dan terdapat 7 data kontraktual yang dilaporkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan nomor: SP DIPA – 120.01-350494/2022 dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 17.226.990.000,- yang kemudian anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategi Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021 dan Nomor: S-458/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Pagu Efektif Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Setelah Blokir

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp3.500.000.000	Rp359.249.000	Rp3.140.752.000
2	Kroordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.800.000.000	Rp338.377.000	Rp2.461.623.000
3	Kooridnasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp2.700.000.000	Rp324.074.000	Rp2.375.926.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI BLOKIR	PAGU EFEKTIF
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp2.250.000.000	Rp297.200.000	Rp1.952.800.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp2.250.000.000	Rp300.639.000	Rp1.949.361.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp1.526.990.000	Rp136.108.000	Rp1.390.882.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp2.200.000.000	Rp208.884.000	Rp1.991.116.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp17.226.990.000	Rp1.964.530.000	Rp15.262.460.000

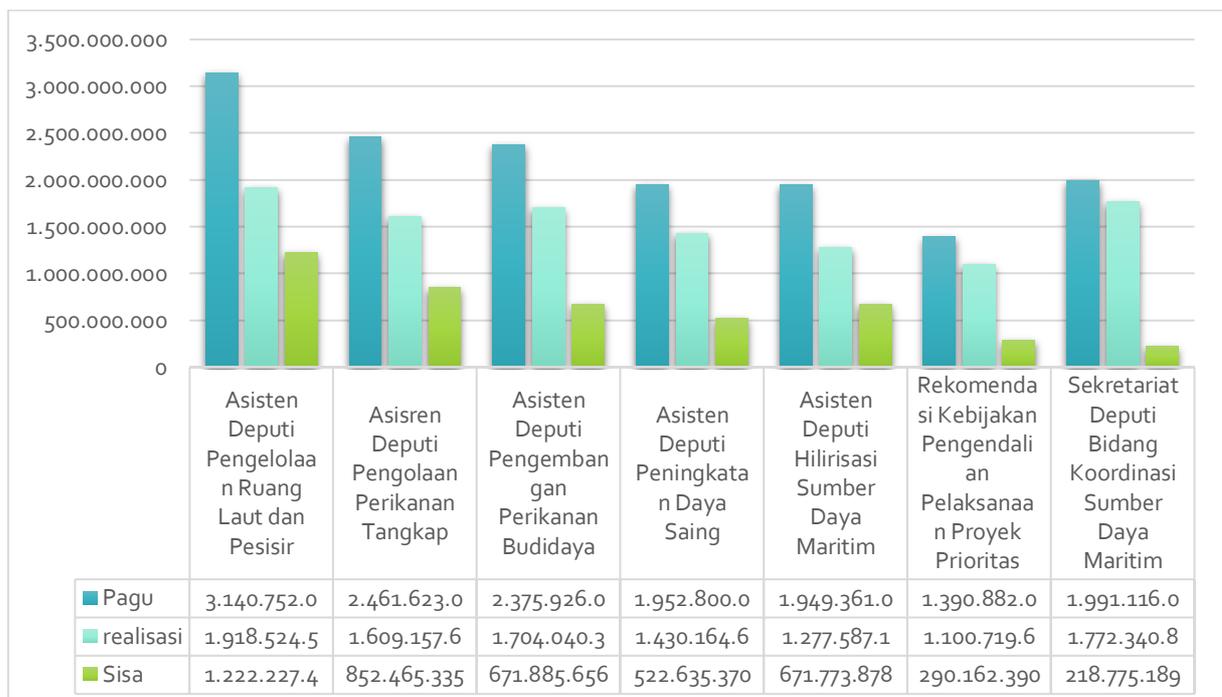
Berikut adalah data realisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 30 September 2022 berdasarkan data dari sistem Aplikasi Sakti:

Tabel 6. Data Realisasi TW III Tahun 2022

Keterangan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	Sisa	%
Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	17.226.990.000	15.262.460.000	10.812.534.735	4.449.925.265	70,84
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	15.026.990.000	13.271.344.000	9.040.193.924	4.231.150.076	68,12
Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	3.500.000.000	3.140.752.000	1.918.524.553	1.222.227.447	61,08
Rekomendasi Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.500.000.000	1.306.910.000	652.125.789	654.784.211	49,90
Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	1.000.000.000	921.748.000	716.636.491	205.111.509	77,75
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan	1.000.000.000	912.094.000	549.762.273	362.331.727	60,27
Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.800.000.000	2.461.623.000	1.609.157.665	852.465.335	65,37
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap	1.200.000.000	668.776.000	485.759.727	183.016.273	72,63
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	800.000.000	1.218.015.000	793.940.808	424.074.192	65,18
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	800.000.000	574.832.000	329.457.130	245.374.870	57,31
Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya	2.700.000.000	2.375.926.000	1.704.040.344	671.885.656	71,72
Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	900.000.000	782.308.000	562.040.908	220.267.092	71,84
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	900.000.000	777.929.000	592.356.476	185.572.524	76,15
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Budidaya	900.000.000	815.689.000	549.642.960	266.046.040	67,38
Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing	2.250.000.000	1.952.800.000	1.430.164.630	522.635.370	73,24
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	750.000.000	690.239.000	526.614.531	163.624.469	76,29
Rekomendasi Kebijakan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	750.000.000	650.422.000	432.425.426	217.996.574	66,48
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	750.000.000	612.139.000	471.124.673	141.014.327	76,96
Asisten Deputy Hilirisasi Sumber Daya Maritim	2.250.000.000	1.949.361.000	1.277.587.122	671.773.878	65,54
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pegaraman dan Marine Bioproduct	787.500.000	679.057.000	443.376.886	235.680.114	65,29
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	787.500.000	687.029.000	439.114.056	247.914.944	63,91
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ilmu Pengetahuan, Ristek dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	675.000.000	583.275.000	395.096.180	188.178.820	67,74

Keterangan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	Sisa	%
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	1.526.990.000	1.390.882.000	1.100.719.610	290.162.390	79,14
5601 Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.200.000.000	1.991.116.000	1.772.340.811	218.775.189	89,01
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	210.347.000	116.987.000	98.299.675	18.687.325	84,03
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	889.653.000	853.833.000	792.560.230	61.272.770	92,82
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	550.000.000	528.939.000	458.657.530	70.281.470	86,71
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	400.000.000	301.945.000	237.100.776	64.844.224	78,52
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	150.000.000	189.412.000	185.722.600	3.689.400	98,05

Dari table data realisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada 30 September 2022 mencapai 70,84% dari pagu efektif yaitu Rp. 10.812.534.735 dari pagu efektif sebesar Rp.15.262.460.000, berikut adalah grafik pagu, capaian realisasi dan sisa anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TW III Tahun 2022:



Pada grafik realisasi tersebut diketahui bahwa pada TW III, unit kerja eselon II dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah pada Unit Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan persentase capaian 89,01%, yang kemudian persentase penyerapan tertinggi berikutnya adalah pada Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim dan Unit Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya dengan persentase capaian realisasi masing-masing 79,14% dan 73,24%. Capaian realisasi terendah yaitu pada Unit Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir sebesar 61,08% hal ini dikarenakan anggaran

yang dimiliki oleh Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir lebih besar dibandingkan pada unit Eselon II lainnya sebesar Rp. 3.140.752.000.



BAB
4

PENUTUP

Pada Triwulan III Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berprogres guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 ini:

- SS.1: Dalam rangka mendukung Capaian IKLI Tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi pengukuran IKLI dan Pemprov DKI telah mengadopsi IKLI dalam Renstra DKPKP tahun 2023-2026.
- SS.2: Dalam rangka mendukung capaian SS.2 ini telah dilakukan penyusunan regulasi, pengawalan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pada pengelolaan perikanan tangkap dan telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Tahun 2022-2024 dalam mendukung perikanan budidaya.
- SS.3: Dalam rangka mendukung capaian SS.3 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian Kawasan konservasi dan capaian IKLI tahun 2022.
- SS.4: Dalam rangka mendukung capaian SS. 4 ini telah dilaksanakan penyusunan Perpres Ekonomi Biru untuk mendukung program Blue Halo S dan telah dilakukan pengawalan terkait kebijakan penangkapan ikan terukur.
- SS.5: Dalam rangka mendukung capaian SS. 5 ini telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Tahun 2022-2024 yang disahkan didalam SK Pokjanas Kemenko Marves.
- SS.6: Dalam rangka mendukung capaian SS. 6 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian nilai ekspor pada sektor perikanan tahun 2022
- SS.7: Dalam rangka mendukung capaian SS. 7 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergarman telah terbit sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB), pada capaian pelaku atau kelompok terfasilitasi telah diterbitkan sertifikat TKDN dan SNI untuk kincir air 1 phase, TKDN kincir air 1 phase dan 3 phase, telah dibangun prototype

reefer container, dan dalam mendukung capaian jumlah riset telah dibuat draft awal Implementing Arrangement (IA) ODA.

- SS.8: Pada TW II Tahun 2022, sudah terdapat progress yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim dengan persentase progress mencapai 50% yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.9: Pada TW II Tahun 2022, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim persentase progress mencapai 50% yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.10: Pada Triwulan II Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- SS.11: Pada Triwulan II tahun 2022 telah dilaksanakan validasi penilaian mandiri PMPRB di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- SS.12: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan II TA 2022 mencapai realisasi anggaran sebesar 40,42% (Rp. 6.168.365.418)

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan kami bahwa laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pihak yang terkait.